

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah memberi pengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

Pengaruh yang kuat antara variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan pada konsep Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandung. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh lain yang cukup besar dari variabel lain selain variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang turut mempengaruhi Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Hasil dari penelitian ini disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menghubungkan variabel atau dimensi-dimensi selain implementasi kebijakan yaitu variabel pengendalian, sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian manajemen pemerintahan.

5.2.2 Saran Praktis

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap, Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada Kepala Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menambah Sumber Daya Manusia petugas

Pelaynan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan agar proses penerbitan perizinan dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

2. Hendaknya Petugas Pelayanan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memberikan kepastian waktu dalam penyelesaian penerbitan SURat Izin Usaha Perdagangan agar kepercayaan masyarakat kepada DINas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan semaksimal berkualitas.
3. Disarankan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menyediakan kotak saran untuk menampung dan melayani keluhan masyarakat.